

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT
PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA MEDAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 2973/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**

**LIVIA BUN
03051190019**

ABSTRAK

Tujuan penelitian Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Medan (Studi Putusan Nomor 2973/Pid.Sus/2020/PN Mdn) untuk mengetahui faktor yang menyebabkan meningkatnya peredaran kosmetik ilegal di Kota Medan. Tujuan kedua, memahami peran BPOM dalam menangani kosmetik ilegal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tujuan ketiga, mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal dalam Putusan Nomor 2973/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif-empiris gabungan unsur normatif (undang-undang, buku, analisis, dan kasus yang diteliti) dengan unsur empiris (sosial). Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Perolehan data menggunakan metode wawancara pada narasumber dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan dan masyarakat serta studi kepustakaan untuk mendukung hasil wawancara. Jenis pendekatan menggunakan sistematika hukum, mengkaji aturan hukum perlindungan terhadap konsumen terkait peredaran kosmetik ilegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendekatan kasus yang terjadi di lapangan melalui Putusan Nomor 2973/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan mengolah data dari kepustakaan.

Hasil penelitian bahwa faktor penyebab peningkatan peredaran kosmetik ilegal di Kota Medan yaitu tingginya permintaan dari masyarakat, kurang kesadaran dan kepedulian akan kesehatan berkaitan dengan akibat penggunaan kosmetik yang tidak memberikan jaminan keamanan, mutu, dan khasiatnya. Peran yang dilakukan BPOM dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yaitu memberikan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan sesudah beredar sebagai tindakan pencegahan dan memastikan bahwa produk obat dan makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu produk yang ditetapkan. Upaya Preventif dilakukan oleh Kelompok Bidang Informasi dan Komunikasi dari pihak BBPOM Medan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, Upaya Represif dilakukan penindakan terhadap toko kosmetik yang sudah berulang kali diberi peringatan, diproses hukum dan barang ilegal dimusnahkan. Tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam Putusan Nomor 2973/Pid.Sus/2020/PN Mdn dikenakan denda sebesar Rp 4.000.000,0- (empat juta rupiah).

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Konsumen, Peredaran, Kosmetik, Ilegal

**LEGAL PROTECTION AGAINST CONSUMERS RELATED TO
ILLEGAL COSMETIC TRADING IN MEDAN CITY (STUDY OF DECISION
NUMBER 2973/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**

**LIVIA BUN
03051190019**

ABSTRACT

The purpose of this research on Legal Protection of Consumers Related to the Distribution of Illegal Cosmetics in Medan City (Study of Decision Number 2973/Pid.Sus/2020/PN Mdn) to find out the factors that cause the increasing circulation of illegal cosmetics in Medan City. The second objective is to understand the role of BPOM in dealing illegal cosmetic based on Presidential Regulation Number 80 of 2017 concerning the Food and Drug Supervisory Agency. The third objective is to determine the legal liability of business actors who distribute illegal cosmetics in Decision Number 2973/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

The research method used is normative-empirical legal research that combines normative elements (laws, books, analysis, and cases studied) with empirical (social) elements. The types of data used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Obtaining data using the interview method on sources from the Center for Food and Drug Control in Medan City and the community as well as literature studies to support the results of interviews. The type of approach uses legal systematics, which examines the legal rules of consumer protection related to the circulation of illegal cosmetics in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and case approaches that occur in the field through Decision Number 2973/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Data analysis uses a qualitative method by processing data from the literature.

The results of the study show that the factors causing the increase in the circulation of illegal cosmetics in Medan City are high demand from the public, lack of awareness and concern for health related to the consequences of using cosmetics that do not provide guarantees of safety, quality, and efficacy. The role carried out by BPOM in Article 3 paragraph (2) and (3) of Presidential Regulation Number 80 of 2017 concerning BPOM is to provide pre-market supervision and post-market supervision as a preventive measure and ensure that drug and food products in circulation meet established product safety, efficacy and quality standards. Preventive efforts are carried out by the Information and Communication Group from BBPOM Medan to provide socialization to business actors and the public, Repressive efforts are carried out to take action against cosmetics stores that have been repeatedly warned, legally processed and illegal goods destroyed. The legal responsibility of business actors in Decision Number 2973/Pid.Sus/2020/PN Mdn is subject to a fine of Rp 4,000,000.0- (four million rupiah).

Keywords: Legal protection, Consumers, Circulation, Cosmetics, Illegal